

"ARAJANNA SOPPENG" MENURUT CERITA RAKYAT

Hary Sumange

(Budayawan Soppeng)

ABSTRACT

Apparently arajang has been inadequately interpreted. Arajang which refers to ornaments or regalia are misleading, since Bugis ancestors had interpreted it as small kingdom. It was Arajang which possessed power, as Tomanurung representation after its vanished (mallajang). Arung Bila, Tomanurung replacement, was arajang task officers. King and his people contract within constitutional monarchy governmental system of Soppeng Kingdom were known with the term mallamungmpatu. The system was based on the principal belief: mangle passing, massongmpawo or to unite lower inspirations with upper policies.

Kerajaan Soppeng dalam bahasa Bugis disebut *Arajanna Soppeng*. Istana Tomanurung dinamakan *Langkana*. Tomanurung mendirikan *Langkana* di Tinco sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Pusat kerajaan di Tinco dilanjutkan oleh Matoa Bila sebagai mandataris *arajang*.

Leluhur orang Bugis memandang *arajang* sebagai bentuk mini kerajaan. *Arajang*-lah pemilik kekuasaan dan kewibawaan kerajaan. Karena itu, terjemahan *arajang* ke dalam bahasa asing nampaknya kurang tepat. *Arajang*

dalam bahasa Belanda diterjemahkan *ornament* dan bahasa Inggris *regelia*. Jika *arajang* dimaknai sama dengan *ornament* atau *regelia*, maka akan terjadi penyempitan pengertian, karena hanya merujuk artefak warisan kerajaan. Padahal *arajang* dalam bahasa Bugis atau *kalompoang* dalam Bahasa Makassar mengandung makna sangat luas, bukan hanya sebagai benda-benda budaya, akan tetapi juga sebagai representasi Tomanurung yang rohnya melekat pada benda tersebut. *Arajang* bukan hanya meliputi benda, sawah, ladang, danau,

Leluhur orang Bugis memandang *arajang* sebagai bentuk mini kerajaan. *Arajang*-lah pemilik kekuasaan dan kewibawaan kerajaan. Karena itu, terjemahan *arajang* ke dalam bahasa asing nampaknya kurang tepat. *Arajang* dalam bahasa Belanda diterjemahkan *ornament* dan bahasa Inggris *regalia*. Jika *arajang* dimaknai sama dengan *ornament* atau *regalia*, maka akan terjadi penyempitan pengertian, karena hanya merujuk artefak warisan kerajaan. Padahal *arajang* dalam bahasa Bugis atau *kalompoang* dalam Bahasa Makassar mengandung makna sangat luas, bukan hanya sebagai benda-benda budaya, akan tetapi juga sebagai representasi Tomanurung yang rohnya melekat pada benda tersebut.

pakaian, peralatan, makanan dan minuman, perhiasan, tetapi juga istana (*salassa*) dan segenap kekuasaan kerajaan.

Arajang mulai menempati posisi

penting sejak Tomanurung Latemma-mala *mallajang* (lenyap) di Lakelluaja. Lakelluaja terletak di Tinco. Lokasinya sekarang dipagar oleh Suaka Peninggaan Sejarah dan kepurbakalaan Makassar. Lakelluaja berarti *makkellu-mallajang* disingkat *lakelluaja*. Toponim tersebut berkaitan dengan sejarah lenyapnya (gaibnya) Tomanurung yang didahului *makellu* (bergundul). Setelah selesai digundul langsung lenyap dan meninggalkan rambutnya. Rambut Tomanurung bersama benda-benda perhiasan dan peralatan yang menyertai disebut *arajang*. Rambutnya dan peralatan kerajaan dipelihara dan disimpan di *Bola Ridi'e*, Soppeng. Benda-benda *arajang* sebagian terbuat dari emas yang bernilai seni tinggi, baik keindahan maupun bentuknya, seperti model usus kerbau, alat permainan logo dan lain-lain.

Meskipun badan Tomanurung telah lenyap, tetapi kekuasaannya atas Kerajaan Soppeng tetap berlanjut. Matoa Bila dalam Lontara disebut *primus inter pares*. Matoa Bila adalah mandataris Tomanurung diantara enampuluh wakil rakyat Kerajaan Soppeng. Matoa Bila merupakan pelaksana tugas *arajang*, sebagai penguasa tertinggi kerajaan.

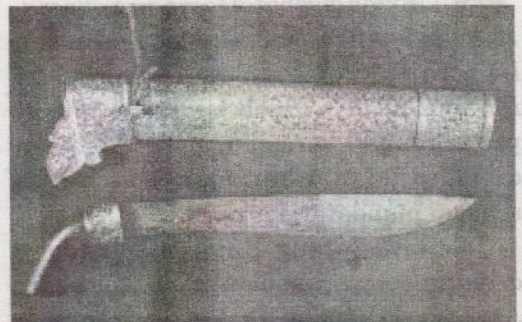


Foto 1.
Parang dan sarungnya, salah satu *arajang*
Kerajaan Soppeng

Meskipun badan Tomanurung telah lenyap, tetapi kekuasaannya atas Kerajaan Soppeng tetap berlanjut. Matoa Bila dalam Lontara disebut *primus inter pares*. Matoa Bila adalah mandataris Tomanurung diantara enampuluh wakil rakyat Kerajaan Soppeng. Matoa Bila merupakan pelaksana tugas *arajang*, sebagai penguasa tertinggi kerajaan.

Bila. Sejak itu, istana Kerajaan Soppeng dibangun menjadi istana kembar: satu istana *arajang* dengan mandataris dan satu istana *datu* sebagai kepala negara.

Pembagian kekuasaan itu melahirkan dua lembaga, yaitu: lembaga *Watangratu (arajang)* dan lembaga *datu* (kedatuan). Bukti tentang *salassa* kembar masih dapat dilihat di dalam benteng istana Datu Soppeng bersusun ke belakang. Istana *arajang Bola Ridie* sebagai generasi terakhir *salassa* kembar yang dahulu rumah panggung dengan keagungan ditandai dengan susunan *timpalaja* dan kini bentuk atapnya joglo atau *Bola Bodo* (lihat foto 2). Model istana *arajang* dibangun ketika pemerintahan kolonial Belanda. Sedangkan istana Datu Soppeng dibangun ketika beliau menjadi Bupati Kabupaten Soppeng yang pertama sejak Republik Indonesia merdeka.

Foto 2.

Bola Ridie (rumah kuning), istana kembar generasi terakhir Kerajaan Soppeng. Dahulu berbentuk rumah panggung dengan keagungan ditandai dengan susunan *timpalaja*. Kini, sebagaimana tampak pada gambar berbentuk atap joglo (Bola Bodo=rumah pendek)



Pada waktu We Teke Wanua diangkat menjadi raja ke empat Kerajaan Soppeng, pemerintahan berjalan seperti sebelumnya. Setelah kekuasaannya We Teke Wanua berakhir, ia mengangkat anak bungsunya menjadi *datu* dan anak salung menjadi *watang ratu* atau Arung

Prof. Dr. Mr. H.A. Zaenal Abidin Farid dalam makalahnya pada seminar Hari Jadi Soppeng di Kantor Bupati tanggal 11 Maret 2000 melansir berita pelantikan H.A. Lawana menjadi Datu Soppeng yang ditemukannya di Laiden. Dalam berita itu, disebutkan bahwa pada

saat pelantikan H.A. Lawana kedudukan Matoa Bila diturunkan menjadi kepala kampung. Kedudukan sebagai kepala pemerintahan digantikan oleh Arung Bila.

Pendapat Zaenal Abidin Farid nampaknya masih perlu dipertimbangkan, sebab mungkin tidaklah tepat jika kedudukan Matoa Bila digantikan oleh Arung Bila. Menurut penulis, yang paling mungkin digantikan kedudukannya sebagai kepala pemerintahan Kerajaan Soppeng adalah *Watangratu* (mandataris) *arajang* yang mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan raja serta merangkap sebagai perdana menteri. Kedudukan sebagai perdana menteri yang hampir sama dengan wewenang kekuasaan lembaga *Watangratu* di zaman pemerintahan Kerajaan Soppeng tradisional yang kemudian disesuaikan dengan petunjuk pemerintah Kolonial Belanda dengan istilah kepala pemerintahan.

Lembaga *Watangratu* pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda secara berangsur-angsur hanya terbatas mengatur/mengurus *arajang* yang berhubungan dengan acara ritual pertanian, — *massoppo wanua*; *mallangi arajang* — dan dipisahkan dengan urusan pemerintahan. Nasib lembaga *watangratu* juga dialami qadi. Pada awal masuknya Islam dan menjadi agama kerajaan (1609), qadi sebagai penghulu syara' menduduki tempat terhormat pada istana *arajang*, yakni pemimpin adat berdasarkan agama Islam. Ketika zaman kolonial, qadi sebagai penghulu syara' juga mulai dibatasi wilayah kekuasaannya oleh pemerintahan. Qadi ber-

Setelah kekuasaannya We Teke Wanua berakhir, ia mengangkat anak bungsunya menjadi *datu* dan anak sulung menjadi *watangratu* atau Arung Bila. Sejak itu, istana Kerajaan Soppeng dibangun menjadi istana kembar: satu istana *arajang* dengan mandataris dan satu istana *datu* sebagai kepala negara. Pembagian kekuasaan itu melahirkan dua lembaga, yaitu: lembaga *Watangratu* (*arajang*) dan lembaga *datu* (kedatuan).

sama *Watangratu* dikontrol oleh Datu Soppeng bersama Kontrolir Belanda. Memasuki zaman kemerdekaan, qadi di Soppeng masih berfungsi sebagai pelayan masyarakat dan hidupnya dari jasa-jasa masyarakat Islam. Sekarang, wewenang qadi digantikan oleh Kantor Departemen Agama dan Peradilan Agama yang mendapat otoritas dan dana dari pemerintah.

Kekuasaan dan Kontrak Raja-Rakyat

Lontara menyatakan bahwa putra-putra Tomanurung adalah pewaris jabatan raja-raja di Sulawesi Selatan.

Meskipun pengertian semacam itu sangat kuat di Sulawesi Selatan, akan tetapi ada dua hal yang kurang mendukung. Pertama, raja setelah Tomanurung tidak ada yang *mallajang* (lenyap) seperti gaibnya Tomanurung Latemmamala. Dalam lontara juga tidak ditemukan kisah yang menyatakan semua raja keturunan Tomanurung *mallajang*. Kedua, kematian raja-raja Bugis setelah periode Tomanurung seperti masyarakat biasa lainnya. Mayatnya berupa jasad yang tidak bernyawa yang dikebumikan. Perbedaan kematian raja dengan masyarakat biasa adalah upacara yang didukung oleh banyak penduduk untuk mengiringi mayat ke liang lahat.

Sumber tutur menceritakan bahwa yang menjadi mandataris Datu Tomanurung Latemmamala sesudah lenyap (*mallajang*) adalah Matoa Bila yang kemudian menjadi Raja Soppeng ke IV dengan sebutan lain We Teke Wanua. A.M. Ali mengatakan bahwa We Teke Wanua adalah Arung Bila pertama di Kerajaan Soppeng.

Dalam sejarahnya, terdapat dua warisan silsilah tentang Datu Soppeng yaitu:

1. Sumber tulis silsilah asal-usul dari Tomanurung Latemmamala secara turun-temurun.
2. Sumber lisan berupa cerita rakyat tentang silsilah raja Soppeng setelah Tomanurung Latemmamala *mallajang* dari keturunan Matoa Bila We Teke Wanua dari Matoa Enam Puluh.

Dalam tradisi kekuasaan di Kerajaan Soppeng dimulai dengan kontrak antara

Dalam sistem pemerintahan monarki konstitusional, segala sesuatu merupakan pertemuan antara aspirasi dari bawah dan kebijakan dari atas

raja dan rakyat yang diwakili oleh para *matoa*. Kontrak kekuasaan dapat dicermati dari *akkuluadanna Tomanurung'e Latemmamala* dengan Matoa Bila selaku wakil rakyat Soppeng pada waktu "*mallamongmpatu*".

Matoa Bila berkata: *Onroni puang ri tanata, ajak tallajang naidi ki po puang. Dongirikeng puang temma-tippa, wessekeng temma kaapa, salipuri keng temmadingin, tia ki-ellau-ellau teng ki passarang'e adek pura onrokeng (adek Toriolokeng); na mauni pattaromeng anameng mu teyai ki teya toi.*

Berkata Tomanurung:
Dek toga mubalicoccorengnga Matoa; ia makku moto tu: namuni pattaromeng anakmeng muteyai ku teya toi.

Maksudnya:

Mohon tinggallah tuanku di tanahmu dan kamu kami jadikan tuan. Lindungilah kami terhadap keamanan dan benda-

Pemerintahan monarki konstitusional Kerajaan Soppeng ditopang oleh pilar agama (kepercayaan kepada Dewata Seuwa'e), hukum (*adek*), dan musyawarah mufakat melalui wakil rakyat (demokrasi; *elo toega*).

benda kami dengan sungguh-sungguh. Persatukanlah kami seperti bersatunya padi dalam satu ikatan yang di dalamnya berisi beras (tidak hampa). Sejahterakan dan makmurkanlah kehidupan secara merata dan menyeluruh. Kami mohon kepada paduka Tuanku supaya kami tidak dipisahkan dengan Undang-undang warisan leluhur kami (*adek toriolokeng*). Biarpun ketetapan kami anak tetapi engkau menyetujui: kami juga tidak setuju.

Berkatalah Tomanurung kepada seluruh rakyat Soppeng bersama Matoa Enam Puluh yang diwakili oleh Matoa Bila: Apakah kamu matoa dan rakyat Soppeng tidak culas? Kalau demikian kehendakmu, saya juga demikian; biarpun kehendak saya, anak saya kamu tidak setuju, saya juga tidak setuju.

Sistem pemerintahan yang didasarkan pada perjanjian (*mallamungmpatu*) antara raja dan rakyat menurut Prof. Dr. Fachruddin Ambo Enre pada seminar hari jadi Soppeng pada tanggal

11 Maret 2000: *Mangelle pasang massorong mpawo*. Dalam sistem pemerintahan monarki konstitusional, segala sesuatu merupakan pertemuan antara aspirasi dari bawah dan kebijakan dari atas. Pemerintahan yang demikian disebut berbentuk monarki konstitusional. Pada model pemerintahan monarki konstitusional, raja sebagai kepala negara kekuasaannya dibatasi oleh hasil kesepakatan antara raja dan wakil rakyat. Model pemerintahan seperti ini di Kerajaan Soppeng sudah berlangsung sejak zaman Tomanurung.

Sistem pemerintahan monarki konstitusional masih berlangsung pada masa pemerintahan Latenribali. Diceritakan bahwa Istana Kembar (istana *arajang* dan istana raja Soppeng) masing-masing bernama *Salassa Lamangade* dan *Salassa Lamangile*. Nama tersebut menggambarkan sistem pemerintahan

Mallamumpatu terkait dengan kata benda batu sebagai saksi sejarah.

Kerajaan Soppeng yang digambarkan seperti kegiatan transpor sungai yang terdiri dari dua alur, yaitu:

- Mangadek* diumpakan perahu yang berjalan di sungai dari hilir menuju ke hulu.
- Mangile*, perjalanan dengan perahu dari hulu ke hilir.

Pemerintahan monarki konstitusional Kerajaan Soppeng ditopang oleh

pilar agama (kepercayaan kepada Dewata Seuwa'e), hukum (*adek*), dan musyawarah mufakat melalui wakil rakyat (demokrasi; *elo toega*).

Nampaknya, sistem pemerintahan dan lembaga Kerajaan Soppeng berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah. Di dalam Lontara' disebut adanya jabatan *pangepa*. Jabatan *pangepa* sudah tidak ada pada akhir pemerintahan Kerajaan Soppeng. Sebagai kenang-kenangan sampai sekarang nama *watangratu* masih didengar meskipun hanya pada saat upacara *mappalili* di Lakelluaja dan pada pelantikan Datu H.A. Galib sebagai Datu Soppeng tahun 1985 yang disaksikan oleh Wakil Gubernur, Kolonel Basri Palaguna.

Prosesi pelantikan raja Soppeng sejak Tomanurung Latemmamala sampai bubarnya Kerajaan Soppeng disebut *Mallamungmpatu*. Tempat pelantikan raja-raja Soppeng tersebut sekarang diabadikan menjadi jalan Lamungpatu'e di depan istana Datu Soppeng. Batu (menhir) yang menjadi pembatas jalan di depan Kantor BRI bernama Lamungmpatu'e. Di tempat itu terjadi perjanjian pemerintahan antara calon raja Soppeng dengan Arung Bila selaku wakil rakyat Soppeng pada saat pelantikan Raja Soppeng XXXIV, Datu H.A. Lawana yang merupakan pelantikan terakhir yang merupakan warisan *adek* yang ditinggalkan Latemmamala dengan Matoa Bila.

Dalam prosesi tersebut Arung Bila, Datu Soppeng *mallamungmpatu*. *Mallamumpatu* terkait dengan kata benda batu sebagai saksi sejarah. Kata

batu dari wujud benda merupakan pilihan terbaik diantara sekian banyak batu-batu yang ada di sungai Soppeng dan di darat yang dijadikan masyarakat Soppeng naik derajatnya melebihi batu-batu lainnya. Bentuknya bundar (bulat) seperti kepala manusia (*uulu*). Huruf pertama dari dua kata ganti sebutan menjadi *datu* sekaligus membedakan status sosial seseorang dengan seluruh masyarakat yang ada di Soppeng, yaitu satu-satunya yang dipertuan di Kerajaan Soppeng (Raja Soppeng). Penggantian/perubahan ucapan satu huruf menyebabkan terjadinya perubahan status sosial seperti kata-kata: La Baco menjadi La Baso dan I Becce menjadi I Besse. Batu menjadi *Lamungmpatu* atau *mataneng batu*, dan dengan kata *datu*. Dengan demikian, kata Datu adalah bahasa Bugis asli yang menunjukkan jabatan raja Soppeng.

Watangratu berasal dari kata *Watangkale* (badan manusia) pasangan dengan *ulu* (kepala manusia). Masing-masing dipandang sebagai kepala Tomanurung Latemmamala dan Badan Latemmamala yang kemudian diwujudkan sebagai lembaga kerajaan yang disebut Datu dan Watangratu yang masing-masing menempati satu istana kembar. Sedang kata *ratu* bukan berarti raja perempuan, tetapi kata-kata tersebut berasal dari kata *Pongratu* yang berarti Tuhan. *Pongratu* dan *Watangratu* adalah kata-kata berpasangan dalam arti adanya hubungan antara yang wujud dan yang gaib.

Simbol pemerintahan Kerajaan

Soppeng kini masih menjadi lambang kabupaten Soppeng yang diletakkan di dada burung Kakatua yaitu: bentuknya bundar di dalamnya ada tulisan *lontara* Bugis berbunyi: Adek, wari, rapang, bicara, dan syara'.

Sumber-sumber cerita rakyat ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk menelusuri bukti-bukti arkeologis yang masih sangat minim dalam rangka memperkuat sejarah Soppeng. Lebih dari itu, penelitian

arkeologis diharapkan dapat mengungkap tatanan masyarakat Soppeng yang teratur dan memiliki tatanan hidup sebagai sebuah kerajaan (negara). Persyaratan yang layak dinamakan sebuah negara kuno: memiliki kepala negara, pemerintahan, *adek* (undang-undang), wilayah teritorial, penduduk atau rakyat yang taat dan tulisan (aksara Bugis).